

PERAN PEMERINTAH DALAM EKONOMI ISLAM

Abd.Ghafur & Nurul Fadila*

Abstract: It is acceptable for the government play an important role in the economy. Development. For example, through public sector policy, the government plays an important role in driving economic growth. However, there seems to be debate in the business literature about whether government should play a role in de-economic development. This article expands the role of government in economic development, which is prevalent in the economic literature. If it seems that there are two opposing poles discussing whether governments should play a role in economic development, this article shows that thematic differences only talk about how many governments play a role. must play in economic development. This article explains the role of government in economic development.

Keywords: *Peran, Pemerintah dan Ekonomi Islam*

* Penulis adalah Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam INZAH Genggong Kraksaan

PENDAHULUAN

Pemerintah adalah penyelenggara sebuah negara untuk mencapai suatu tujuan bersama. Tujuan bersama adalah tujuan yang meningkatkan kesejahteraan, baik dalam bidang pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses dimana pemerintah dan orang-orangnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk model kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan lapangan baru untuk bekerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Karena alasan itu, keterlibatan pemerintah dan masyarakat yang menggunakan sumber daya yang ada harus dapat memperkirakan sumber daya potensial yang diperlukan untuk membangun dan membentuk ekonomi daerah.¹

etiap komunitas memiliki keinginan yang meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup. Semua orang menginginkan peningkatan nilai dari satu titik ke nilai lain yang lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, tentu saja, media lain diperlukan selain kerja keras yang dilakukan setiap individu. Media mampu memenuhi kebutuhan seluruh komunitas.

Masalah ekonomi yang berperan dalam ekonomi, yaitu:

- 1) Rumah tangga
- 2) Perusahaan
- 3) Negara (pemerintah)
- 4) Komunitas luar negeri.

Negara memainkan peran penting dalam mewujudkan keinginan masyarakat, yaitu meningkatkan standar hidup dan kualitas hidup. Dalam masalah ekonomi, negara harus menjamin dan memastikan bahwa semua warga negara memiliki peluang yang sama untuk menggunakan sumber daya ekonomi. Oleh karena itu negara harus mengatur dan mendistribusikan penggunaan sumber daya ekonomi secara adil dan merata. Dalam ekonomi ini menggaris bawahi konsep liberal yang menekankan perlunya kebebasan mutlak bagi masyarakat dalam berbagai kegiatan ekonomi tanpa campur tangan negara.²

¹ “<https://gusvirosssafutrii.blogspot.com/2016/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar>. Diakses pada tanggal 28 November 2019”

² Ani Sri Rahayu, “*Pengantar Kebijakan Fiskal*” (Jakarta: Bumi Aksara, 2010)

Mengingat klaim sekolah sosialis bahwa kebebasan absolut yang diberikan kepada individu dapat menciptakan oposisi dan akan ada pihak yang kurang beruntung. Karena itu kaum sosialis berasumsi bahwa konsep mengatur dan mengendalikan kehidupan ekonomi sepenuhnya diatur oleh pemerintah. Pemerintah memainkan peran yang sangat dominan dalam perencanaan dan penggunaan faktor produksi, implementasi dan peraturan untuk distribusi barang ekonomi.³

Dalam ekonomi Islam, tindakan ekonomi diatur secara seimbang sehingga peran individu memperoleh kebebasan, tetapi dibatasi oleh batasan-batasan tertentu dan pemerintah menetapkan peraturan sesuai dengan kehendak rakyat. Adanya peraturan pemerintah mendorong harmonisasi kegiatan ekonomi. Dengan menerapkan ekonomi Islam, masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama untuk mengembangkan ekonomi yang adil dan makmur.

Setiap warga negara memiliki hak dan peluang yang sama untuk diperlakukan secara adil oleh negara dan warga negaranya. Prinsip keadilan harus diwakili oleh negara vis-à-vis masyarakat, yang mencakup semua bidang kehidupan, dari agama, pendidikan, kesehatan, hukum, politik hingga ekonomi. Keadilan adalah salah satu aspek terpenting ekonomi yang didasarkan pada ekonomi Islam. Keadilan dapat mencapai keseimbangan dalam perekonomian dengan menutup celah antara pemilik modal dan mereka yang membutuhkan modal.

PEMBAHASAN

A. NEGARA DALAM PRESPEKTIF ISLAM

Dalam kehidupan masyarakat tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab perintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterkan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam prespektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas didasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterkan masyarakat umum, sehingga dalam prespektif islam negara dapat mendefinisikan apapun fungsinya dalam mencapai sasaran tersebut.⁴

³ Ibid, "Pengantar Kebijakan Fiskal", 15

⁴ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam "Prespektif Konsep Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum"*, (Surabaya: Vira Jaya Multi Press, 2008), 283

Menurut M. Nejatullah Siddiqi, mengklasifikasikan fungsi negara dalam perspektif Islam terdiri dari tiga kategori:

1. Tugas-tugas yang secara konstan ditugaskan oleh Syariah meliputi:
 - a. Pertahanan
 - b. Hukum dan ketertiban
 - c. Kebenaran
 - d. Pemenuhan
 - e. Dakwah
 - f. Amar Makruf Nahi Mungkar
 - g. Administrasi Sipil
 - h. Pemenuhan kewajiban sosial
2. Fungsi turunan berbasis syariah berdasarkan kondisi sosial dan ekonomi pada waktu tertentu, termasuk 6 fungsi:
 - a. konservasi
 - b. Penyediaan fasilitas untuk kepentingan umum
 - c. Penelitian
 - d. Peningkatan modal dan pembangunan ekonomi
 - e. Pemberian hibah untuk kegiatan pribadi tertentu
 - f. Pengeluaran dimaksudkan untuk stabilitas politik.
3. Fungsi yang ditugaskan pada saat yang sama didasarkan pada proses konseling (Syara), yang mencakup semua kegiatan yang dipercayakan masyarakat kepada proses Syura. Inilah yang, menurut Siddiqi, terbuka dan bervariasi tergantung pada keadaan masing-masing negara.⁵

Menurut Islam, negara memiliki hak untuk melakukan intervensi dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu, baik untuk memantau kegiatan atau untuk mengatur atau melakukan berbagai jenis kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilakukan oleh individu. Partisipasi negara dalam kegiatan ekonomi pada awal Islam sangat kurang karena kegiatan ekonomi masih sederhana karena kemiskinan lingkungan di mana Islam muncul. Selain itu, ini juga disebabkan oleh kontrol spiritual dan stabilitas mental umat Islam di masa awal yang membuat mereka secara langsung mematuhi perintah Syariah dan sangat berhati-hati untuk melindungi keselamatan mereka dari penipuan dan kesalahan. Semua ini

⁵ Ismail Nawawi, *Ekonomi Islam "Prespektif Teori Sistem dan Aspek Hukum"*, (Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009), 182.

mengurangi peluang negara untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi.⁶

B. PERAN PEMERINTAH EKONOMI ISLAM

Dalam sistem ekonomi apa pun, baik itu sistem ekonomi kapitalis⁷ atau sistem ekonomi sosial,⁸ pemerintah selalu memiliki peran penting.

Peran pemerintah sangat luas dalam sistem ekonomi sosialis dan sangat terbatas dalam sistem ekonomi kapitalis murni karena sistem kapitalis yang dikembangkan oleh Adam Smith menyatakan teori bahwa pemerintah hanya memiliki tiga fungsi:

1. Fungsi pemerintah untuk menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan
2. Fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan keadilan
3. Fungsi pemerintah untuk menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh sektor swasta, seperti jalan, bendungan, dll.

⁶ Muhammad 'Abid Al-Jabiri, "*Agama Negara dan Penerapan Syariah*", (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2001), 20.

⁷ Ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini pemerintah bisa turut andil dan mengambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam perekonomian kapitalis setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Semua orang berhak berlomba-lomba untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara.

⁸ Ekonomi sosialis adalah suatu sistem perekonomian yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi tetapi dengan campur tangan pemerintah. Pemerintah masuk kedalam perekonomian untuk mengatur tata kehidupan perekonomian negara serta jenis-jenis perekonomian yang menguasai kepentingan hidup orang banyak, dikuasai oleh negara seperti air, listrik, telekomunikasi, gas, dan lain sebagainya. Sistem ekonomi sosialis adalah suatu sistem ekonomi dengan kebijakan atau teori yang bertujuan untuk memperoleh suatu distribusi yang lebih baik dengan tindakan otoritas demokratisasi terpusat kepadanya perolehan produksi kekayaan yang lebih baik dari pada yang kini berlaku sebagaimana yang diharapkan. Sistem ekonomi sosialis berpandangan bahwa kemakmuran individu hanya mungkin tercapai bila berfondasikan kemakmuran bersama. Sebagai konsekuensinya, penguasaan individu atas aset-aset ekonomi atau faktor-faktor produksi sebagian besar merupakan kepemilikan sosial.

Dapat dipahami bahwa dengan kemajuan dan perkembangan di setiap negara tidak ada sebuah negara kapitalis tunggal di dunia yang mewujudkan sistem kapitalis murni. Di dunia modern, pemerintah harus memainkan peran yang lebih besar dalam mengatur manajemen ekonomi negara. Adam Smith sebagai perancang sistem kapitalis semata mengungkapkan ideologinya karena dia berasumsi bahwa ekonomi kapitalis dari setiap individu lebih tahu apa yang terbaik untuk dirinya sendiri, sehingga dia akan melakukan apa yang dianggap baik untuknya. Prinsip kebebasan ekonomi dalam praktik membahas kepentingan yang saling bertentangan, karena tidak ada koordinasi yang menciptakan harmoni dalam kepentingan masing-masing individu. Dalam hal ini pemerintah memiliki peran mengatur, meningkatkan atau mengarahkan kegiatan sektor swasta. Dalam ekonomi modern, peran pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu:

1) Peranan Alokasi

Peran oleh pemerintah sangat diperlukan terutama dalam hal pasokan barang yang tidak dipasok oleh sektor swasta seperti barang publik yang juga biasa disebut sebagai barang publik. Karena dalam sistem ekonomi suatu negara, tidak semua barang dipasok oleh sektor swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Jadi dalam hal ini pemerintah harus dapat menyediakan barang publik ini. Jika pemerintah tidak dapat menyediakan barang publik ini melalui mekanisme pasar, ini disebut kegagalan pasar. Karena manfaat dari barang-barang ini mereka tidak dapat dinikmati dan dirasakan oleh masyarakat dan bahkan tidak dimiliki oleh Anda sendiri, dengan kata lain barang tidak memiliki sifat pengecualian seperti barang pribadi. Misalnya, udara bersih, jalan umum, jembatan dan sebagainya. Kegiatan mengalokasikan faktor-faktor produksi atau barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi tujuan dari kegiatan ini adalah untuk secara efektif memenuhi kebutuhan pribadi atau individu serta kebutuhan masyarakat yang tidak dapat dipenuhi oleh mekanisme pasar seperti pendidikan, kegiatan pertahanan dan keamanan serta keadilan.⁹

⁹ "https://www.kompasiana.com/amp/ratudevi/peranan-pemerintah-dalam-perekonomian_550ea7e5a33311ae2dba81bb#aoh=15752100621329&_ct=1575210142777&csi=&referrer=https%3A%2f%2fwww.google.com&_

2) Peranan distribusi

Peran distribusi adalah peran pemerintah sebagai distribusi pendapatan modal. Tidak mudah bagi pemerintah untuk memainkan peran ini, karena distribusi ini terkait erat dengan masalah keadilan. Sementara masalah keadilan terlalu kompleks, karena keadilan adalah salah satu masalah yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai persepsi, pertanyaan tentang keadilan juga tergantung pada visi keadilan masyarakat itu sendiri, karena keadilan adalah masalah yang relatif dan dinamis. Kegiatan untuk mencapai redistribusi pendapatan atau transfer pendapatan memberikan koreksi pada distribusi pendapatan yang ada di masyarakat. Pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan masyarakat secara langsung atau tidak langsung. Contoh langsung adalah perpajakan progresif, yang mengenakan pajak yang relatif lebih tinggi pada orang kaya dan relatif lebih sedikit pada orang miskin. Sedangkan contoh yang tidak langsung seperti kebijakan pengeluaran pemerintah misalnya, pembangunan tipe rumah sederhana dan sangat sederhana yang memiliki lebih banyak ransum rumah mewah, untuk kelompok pendapatan tertentu, subsidi untuk petani pupuk, dll.

3) Peranan stabilisasi

Peran stabilisasi adalah kegiatan yang menstabilkan ekonomi dengan menggabungkan kebijakan dan kebijakan moneter dengan kebijakan lain seperti kebijakan fiskal dan perdagangan untuk meningkatkan dan mengurangi permintaan agregat untuk mempertahankan pengangguran penuh dan juga menghindari inflasi. Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam menstabilkan perekonomian, seperti: terjadinya deflasi, inflasi, penurunan permintaan atau penawaran suatu barang, yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnya masalah lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi dan lain-lain.¹⁰

Sementara itu, Barton menyebutkan peran utama pemerintah secara garis besar adalah:

tf=dari%20%251%24s. Diakses pada tanggal 01 desember 2019”

¹⁰ Ibid, “*peranan-pemerintah-dalam-perekonomian*”

- 1) Peran alokasi sumber daya
Peran alokasi sumber daya mencakup pertanyaan menentukan ukuran absolut dan relatif pemerintah dalam perekonomian (keseimbangan masyarakat dan pribadi) dan penyediaan barang publik dan layanan bantuan sosial bagi masyarakat.
- 2) Peran regulator
Peran regulator Ini termasuk hukum dan peraturan yang diperlukan untuk masyarakat, termasuk hukum yang mengatur dunia bisnis yang cukup untuk memfasilitasi kegiatan komersial dan hak milik pribadi.
- 3) Peran kebijakan jaminan sosial
Peran kebijakan jaminan sosial yang mendorong pemerataan sosial di negara seperti perpajakan, jaminan sosial (pembayaran transfer) dan penyediaan sejumlah barang publik yang bercampur dengan masyarakat.
- 4) Peran mengelola ekonomi makro
Memfasilitasi stabilitas umum dan kemakmuran ekonomi negara melalui kebijakan yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang stabil, lapangan kerja penuh, inflasi rendah dan stabilitas di negara-negara pembayaran.

C. TUGAS-TUGAS PEMERINTAH DALAM EKONOMI

1. Mengawasi faktor-faktor utama yang menggerakkan perekonomian
Pemerintah harus memantau pergerakan ekonomi, seperti pemantauan dan larangan praktik-praktik yang tidak patut, baik dalam sistem pembelian dan penjualan, dan dalam produksi, konsumsi, dan sirkulasi. Cek harus dilakukan oleh tim independen (*abl al bisbab*). Tim ini mengawasi badan-badan, pabrik, dan kepemilikan lainnya agar tidak mendapatkan manfaat yang tak tersentuh masyarakat dengan menggunakan kepolosan dan ketidaktahuan mereka untuk memuaskan nafsu keserakahan yang lahir dari semangat nol moralitas.
2. Menghentikan muamalah yang diharapkan
Yang dimaksud dengan muamalah kategori haram adalah berbagai bentuk dari muamalah yang dilarang karena mereka bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang didasarkan pada moralitas dan

mempertahankan manfaat publik seperti riba, penimbunan dan monopoli. Islam sangat peduli dengan ekonomi rakyat, jadi Islam adalah jaminan untuk melindungi harta benda setiap orang, sehingga tidak digunakan secara sembarangan atau secara resmi. Islam benar-benar melarang penggunaan properti secara kejam dalam perekonomian negara. Sejauh menyangkut tempat pembuangan akhir, negara berkewajiban untuk memerangnya dengan keras dan kejam, meskipun diperoleh dengan secara paksa memindahkan barang-barang yang disimpannya, kemudian menjual kepada orang-orang yang membutuhkan dengan harga yang wajar dan wajar serta keuntungan yang wajar.

3. Tetapkan harga jika perlu

Ahli Fiqh tidak setuju dalam hal penetapan harga, tidak sah atau sah. Ada beberapa yang menguduskan mengapa ada sejumlah teks yang melarang penetapan harga. Di antara ini adalah kisah Anas dari Rasul SAW: sesuatu di mana ada krisis pada zaman Nabi, sehingga para sahabat memintanya untuk menetapkan harga barang: “seandainya Anda ingin menetapkan harga barang” ? dia menjawab: sebenarnya Allah SWT yang maha kuasa, mencakup segala, jujur dan beruntung. Tentunya tidak ada penghargaan jika Tuhan ditakdirkan, jadi tidak ada yang meminta saya untuk melakukan kejahatan yang saya lakukan kepada seseorang yang menentang darah dan kekayaan. Dasar hukum dan bidang-bidang yang dapat dan tidak dapat diintervensi oleh negara.¹¹

D. RASIONALITAS PERAN PEMERINTAH

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara tidak dibahas dalam teori atau perkiraan pemikiran ekonomi. Pemerintah memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi melalui berbagai langkah yang terkait dengan sektor publik..¹² Pertumbuhan ekonomi didorong, misalnya, oleh langkah-langkah pemerintah yang bertujuan menarik investor, mempromosikan pengembangan teknologi

¹¹ Ilfi Nurd Diana, “*Hadist-Hadist Ekonomi*”, (Malang: UIN Malang Pres, 2008),53

¹² James Post, dkk, “*Business and Society - Corporate Strategy, Public Policy, Ethics*”, (New York: McGraw-Hill Inc, 1996), 209-210

atau memproduksi / melatih tenaga kerja yang dibutuhkan di pasar tenaga kerja. Sekalipun kemudian muncul pandangan yang tampaknya memunculkan dua kutub pandangan yang menguraikan kebutuhan dan peran pemerintah, perbedaan antara kedua pandangan itu sebenarnya hanya ukuran atau tingkat peran pemerintah. Adam Smith, yang sering dianggap sebagai pendiri (pendiri) ekonomi modern dan pendukung penting.¹³ Mekanisme pasar penuh (*Jaissez faire*) juga pada dasarnya memberikan peran pemerintah dalam perekonomian, tetapi hanya bagian yang sangat terbatas.¹⁴

Penyediaan barang publik dan upaya untuk mempromosikan konsumsi barang bermanfaat (barang pantas) adalah pembenaran ekonomi untuk mengklasifikasikan partisipasi negara dalam perekonomian.¹⁵ Awalnya, ekonom pembangunan hanya mengakui peran pemerintah sebagai menyediakan modal sosial atau infrastruktur untuk memfasilitasi pembangunan ekonomi.¹⁶

Pertimbangan berikutnya, bagaimanapun, memunculkan pemikiran yang menekankan perlunya bagi pemerintah untuk melakukan intervensi yang lebih ekonomis untuk menyelesaikan masalah-masalah tertentu, dan tidak hanya sekedar menyediakan infrastruktur perekonomian. Dengan demikian, yang membedakan pemikiran para ekonom tersebut adalah se-jauh mana peran pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian, dan bukan perlu atau tidaknya pemerintah tersebut. Tentang besar-kecilnya intervensi pemerintah dalam perekonomian ini, para ekonom dalam periode tertentu juga melahirkan anis pemikiran yang berbeda. Pada tahun 1950-an, para ekonom dengan argumentasi yang meyakinkan berpendapat bahwa perencanaan dan intervensi pemerintah dalam perekonomian merupakan suatu keharusan untuk mendukung

¹³ Li, Wei (1997), "The Impact of Economic Reform on the Performance of Chinese State Enterprises 1980-1989", of *Political Economics*, vol. 105, No. 5 JEP Vol.4 No. 1, 1999 53

¹⁴ Joseph E, Stiglitz, *Economics of the Public Sector*, (New York-London, WW Northon & Company, 1986), 8

¹⁵ Rosen, Sherwin, dan Bruce A. Weinberg, "Incentives, Efficiency, and Government" *Provision of Public Services* *wrt Mo/ Bank Conference Development Economics 1997*", (Washington DC, The World Bank, 1998), 139-166

¹⁶ Krueger, Anne, "Government Failures in Development" *Journal of Economic Perspectives*, vol. 4, no. 3, summer, 1990, 9

pertumbuhan ekonomi. Tetapi pada tahun 1970-an dan 1980-an, para pakar pembangunan paling tidak di negara Barat dan lembaga-lembaga bantuan internasional” menyerukan lebih banyak pada pengurangan pemerintah, dan mendorong aktivitas ekonom! pada swasta atau pasar.¹⁷

Disamping adanya kebutuhan akan penyediaan infrastruktur, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan perlunya pemerintah melakukan intervensi dalam perekonomian. Menurut Meier argumen tersebut adalah, pertama, adanya kegagalan pasar atau marketfailure, termasuk adanya eksternalitas ekonomis, skala produksi yang menaik, penyediaan barang publik dan informasi yang tidak sempurna. Kedua, perhatian untuk menghilangkan kemiskinan dan meningkatkan distribusi pendapatan. Ketiga, adanya tuntutan atau hak untuk pemenuhan fasilitas pokok seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan. Keempat, penyediaan dana-dana untuk masyarakat tertentu yang menjadi tanggung jawab pemerintah, seperti pensiun, beasiswa, dan sebagainya, Kelima, melindungi hak-hak generasi mendatang, termasuk yang berkaitan dengan masalah lingkungan.¹⁸

Di negara-negara sedang berkembang pemerintah memiliki tradisi yang panjang dalam mengontrol atau campur tangan dalam perekonomian, bahkan sampai pada tingkat manajemen mikro. Intervensi ini termasuk dalam penetapan harga, pengontrolan kredit, pemasaran, dan restriksi-restriksi pada investasi asing dan keuntungannya.¹⁹

E. FAKTOR KELEMBAGAAN UNTUK MENDUKUNG PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Dalam perkembangan pemikiran ekonomi sekarang ini kecenderungan yang terjadi adalah semakin diterimanya pemikiran-pemikiran yang

¹⁷ Perkins, Dwight H, “*Economic System Reform in Developing Countries*” dalam Perkins dan Michael Roemer, *Reforming Economic System in Developing Countries*, Cambridge, Massachusetts, Harvard Institute for International Development, 1991, 28

¹⁸ Meier M. Gerald, “*Leading Issues in Economic Development, edisi keenam*”. New York, Oxford University Press, 1995, 548

¹⁹ Boeninger, Edgardo, “*Government and Development: Issues and Constraints*”, *The World Bank, Proceeding of The World Bank Annual Conference on Development Economics 1991*”, Washington DC, IBRD, 1992, 277

mendukung terbentuknya suatu perekonomian pasar yang terbuka. Proses integrasi ekonomi regional dan global yang terus berlangsung dan dengan kecepatan yang semakin tinggi, merefleksikan adanya kecenderungan tersebut. Ini berarti peran pemerintah dalam perekonomian semakin diminimalkan. Namun demikian, peran yang semakin kecil ini tidak berarti menciptakan pula negara yang lemah untuk melakukan intervensi dalam hal-hal tertentu yang menjadi bidangnya. Bahkan untuk keefektifan intervensi tersebut dibutuhkan suatu negara yang kuat, dan ini bisa mewujudkan jika didukung pula oleh aspek kelembagaan yang kuat pula. Dalam hal ini paling tidak ada empat lembaga yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Lembaga ekonomi dan politik
2. Lembaga hukum yang independen
3. Organisasi relawan swasta
4. Lembaga pengawasan umum atau masyarakat

Lembaga ekonomi ini, misalnya, menyangkut masalah yang berkaitan dengan administrasi perpajakan, pengaturan lembaga perbankan, pengaturan perilaku bisnis, dan sebagainya. Dalam konteks perpajakan, misalnya adalah sangat penting bagi pemerintah untuk mendukung perannya dalam tugas pemerintahannya. Anggaran penerimaan pemerintah, yang terbesar umumnya juga berasal dari perpajakan tersebut. Oleh karena itu, apabila lembaga perpajakan ini lemah, atau menimbulkan adanya rasa tidak adil dikalangan wajib pajak dan masyarakat, maka pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah juga bisa terganggu. Lembaga ekonomi yang kuat ini juga menyangkut lembaga perencanaan pembangunan. Dukungan lembaga ini akan memberikan kejelasan arah dan tujuan dari setiap rencana pembangunan ekonomi, sehingga pelaku-pelaku ekonomi di luar pemerintah dapat melakukan langkah-langkah yang saling melengkapi dan menguntungkan. Misalnya, adanya suatu perencanaan untuk melakukan perombakan struktur ekonomi, dapat menjadi informasi bagi swasta untuk mengalokasikan investasinya pada sektor-sektor yang akan dipacu perkembangannya. Dengan adanya pengembangan pada sektor-sektor tertentu, maka dapat dipastikan bahwa infrastruktur pendukungnya akan dibangun oleh pemerintah. Ini merupakan eksternalitas ekonomis yang akan menarik investasi swasta pada sektor yang infrastrukturnya sudah dibangun oleh pemerintah tersebut.

Di sisi politik, lembaga yang sangat penting yang dapat memperkokoh pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya adalah partai politik dan perundang-undangan. Modernisasi partai-partai politik memperkuat akar mereka di masyarakat dan menciptakan struktur dukungan teknis untuk meningkatkan kinerjanya, merupakan kondisi yang mendasar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dalam lingkungan yang majemuk. Dalam kasus yang terjadi di Indonesia, dapat dilihat bahwa partai-partai politik sangat lemah dan kecil perannya dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Akibatnya, peran pemerintah pun menjadi tidak optimal dalam upaya melaksanakan program-program pembangunannya secara benar dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan pembangunan ekonomi nasionalnya. Transisi pemerintahannya juga berjalan tidak normal, sehingga menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan bagi pembangunan ekonominya. Ini berbeda dengan yang terjadi di Chile, di mana adanya sistem kepartaian yang kuat, telah memberikan kontribusi yang besar dalam transisi secara damai untuk membentuk pemerintahan yang demokratis.

Adanya lembaga peradilan yang independen dan ketertiban hukum merupakan salah satu syarat penting pula untuk mendukung peran pemerintah yang terbatas namun kokoh. Tujuan-tujuan ekonomi akan dengan mudah dibelokkan untuk mendukung vested interest, walaupun ini merugikan kepentingan perekonomian secara keseluruhan. Hal ini tentu sulit dilakukan apabila terdapat Lembaga hukum yang kuat dan independen, sehingga setiap tindakan harus berdasarkan hukum (*rule of law*). Adanya ketentuan hukum ini akan menjadi landasan yang mengatur hubungan individual dan kelompok dalam masyarakat, seperti halnya juga hubungan warga negara dengan pemerintah. Hal ini juga memberikan kepastian hukum pada lembaga-lembaga ekonomi yang berkaitan dengan hak milik, kontrak, dan tanggung jawab utang piutangnya.

Jika dalam pembangunan ekonomi di banyak negara berkembang terjadi kasus-kasus kebocoran atau korupsi, ini juga merefleksikan lemahnya institusi peradilan, di samping juga karena tidak eksisnya lembaga-lembaga pengawasan dari publik. Korupsi, dalam berbagai bentuknya, memang dialami oleh negara maju maupun negara berkembang. Tidak ada satu negara pun didunia ini yang bebas korupsi

sama sekali.²⁰ Namun demikian, di negara berkembang, seperti halnya yang terjadi di Indonesia, kasus ini lebih meluas dan parah dampaknya. Ini terkait dengan lemahnya pemerintahan dinegara berkembang tersebut.

Dengan melihat kasus-kasus yang terkait dengan korupsi dan sejenisnya di Indonesia, misalnya, terutama pada masa rezim Orde Baru, adalah sangat transparan, dan sebenarnya bisa langsung dideteksi oleh masyarakat dan unsur pengawas dalam birokrasi sendiri. Namun demikian, karena lemahnya hukum dan kontrol sosial, serta kuatnya posisi birokrat yang melakukan tindakan korupsi dan praktek lainnya yang merugikan pembangunan ekonomi nasional tersebut, mengakibatkan hanya sebagian kecil dari kasus korupsi ini yang bisa diselesaikan. Sebagian besar dari kasus ini dibiarkan terus berlanjut, bahkan perbuatan yang demikian dianggap sebagai suatu kelumrahan oleh sebagian besar masyarakat, karena ketidakberdayaan untuk meluruskan perbuatan yang merugikan kepentingan masyarakat banyak tersebut. Hal demikian mencerminkan bahwa ketidakterbukaan untuk memerangi korupsi diakibatkan karena ketakutan berhadapan dengan kekuasaan yang sentralistik di puncak birokrasi tersebut, sebagai akibat lemah dan tidak independennya lembaga hukum maupun lembaga kontrol masyarakat memang tidak mudah untuk menghapuskan korupsi yang meluas tersebut.

F. PEMERINTAH DAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, pemerintah juga terlibat dalam aktivitas produksi, disamping juga distribusi, melalui badan-badan usaha yang dibentuknya. Berbeda dengan sektor swasta yang selalu berusaha mendapatkan keuntungan maksimal, perusahaan pemerintah (government enterprise) tidak seldu mengutamakan keuntungan maksimal dalam aktivitas tersebut. Badan usaha milik negara ada pula yang didesain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti menciptakan kesempatan kerja, pengembangan daerah, merintis usaha yang belum dimasuki sektor swasta, dan sebagainya. Secara umum dapat diringkaskan tujuan dari badan usaha milik negara ini adalah:

1. Memaksimalkan kesejahteraan Masyarakat

²⁰ Ackerman, Susan Rose "Corruption: Catalist and Cosntraints", (Annual Bank Conference, 1998)

2. Memaksimalkan tujuan “tertentu” dari manajemen atau pemerintah, termasuk kemungkinan memperoleh keuntungan maksimal.

Tujuan tertentu tersebut, misalnya, penciptaan lapangan kerja, melayani barang kebutuhan publik, mendapatkan keuntungan, pengembangan industri atau sektor yang dianggap strategis, merintis pengembangan usaha yang belum dimasuki swasta, dan sebagainya. Dengan demikian badan-badan usaha milik Negara ini terdapat tujuan-tujuan non-komersial, disamping tujuan komersialnya. Lingkup kegiatan badan usaha pemerintah dapat mencakup semua sector ekonomi, tetapi biasanya terkonsentrasi pada bidang yang terkait dengan penyediaan kebutuhan mayoritas penduduk. Namun demikian, di negara sosialis ataupun komunis, pemerintah dengan ribuan (bahkan ratusan ribu, termasuk yang dimiliki pemerintahan lokal seperti di RR Cina) badan usahanya, yang bergerak dalam semua sektor ekonomi. Sebaliknya di negara-negara kapitalis, pemerintah hanya bergerak pada sektor tertentu saja. Di Amerika Serikat, sektor ekonomi yang dimasuki pemerintah sangat terbatas, seperti sektor jasa pos, listrik, kereta api, asuransi dan perbankan. Pengalaman banyak negara, menunjukkan bahwa banyak dari badan usaha yang dimiliki pemerintah berjajian tidak efisien dan justru menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat. Hal ini telah mendorong terjadinya upaya privatisasi badan-badan usaha milik negara tersebut.

Disamping alasan efisiensi tersebut, argumentasi yang menyarankan swastanisasi adalah alasan ideologis dan keuangan. Swastanisasi dianggap sebagai bagian dari demokratisasi ekonomi, karena akan melibatkan banyak pelaku ekonomi dalam menangani sektor usaha tertentu.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat dikemukakan beberapa kesimpulan yang berkaitan dengan peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pertama, peran pemerintah dalam perekonomian merupakan sesuatu yang mutlak, namun demikian peran ini terbatas pada aspek-aspek tertentu, seperti yang berkaitan dengan penyediaan barang-barang publik dan mengatasi terjadinya kegagalan pasar.

Kedua, implementasi peran pemerintah dalam perekonomian mengalami pasang surut yang berkaitan dengan seberapa besar peran

tersebut dapat diterima. Pada masa sekarang ini peran pemerintah diterima dalam batas-batas yang moderat, tanpa mengganggu atau menghambat jalannya kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sektor swasta.

Ketiga, dalam peran pemerintah yang moderat tersebut maka perlu dukungan kelembagaan yang kuat, baik dari lembaga yang menyangkut masyarakat banyak dan di lingkungan pemerintah sendiri maupun sektor yang kurang menarik bagi sektor lembaga-lembaga di luar pemerintahan untuk swasta. Untuk melengkapi dan mengontrol jalannya namun demikian, perlu ada upaya lembaga pemerintahan tersebut. Untuk melakukan privatisasi dan korporatisasi.

Keempat keberadaan badan-badan untuk perusahaan-perusahaan milik negara usaha milik negara masih diperlukan untuk yang tidak efisien atau menjadi beban bagi melengkapi badan-badan usaha milik negara, tanpa memberikan kontribusi yang swasta, khususnya untuk sektor-sektor berarti bagi perekonomian secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackerman, Susan Rose (1998) *“Corruption: Catalist and Cosntraints”*, AnnualBank Conference
- Abid, Muhammad ‘Al-Jabiri, 2010, *“Agama Negara dan Penerapan Syariah”*, Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Boeninger, Edgardo, 1992, *“Government and Development: Issues and Constraints”*, *The World Bank, Proceeding of The World Bank Annual Conference ond Development Economics 1991*, Washington DC, IBRD
- Krueger, Anne, 1990, *“Government Failures in Development”* Journal of Economic Perspectives, vol. 4, no. 3, summer
- Lestari, W., Pratama, L. D., & Jailani, J. (2018). Implementasi Pendekatan Saintifik Setting Kooperatif Tipe STAD Terhadap Motivasi Belajar Dan Prestasi Belajar Matematika. AKSIOMA: Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, 9(1), 29-36.
- Meier M. Gerald, 1995, *“Leading Issues in Economic Development, edisi keenam”*. New York, Oxford University Pressm
- Nawawi, Ismail, 2008, *“Ekonomi Islam “Prespektif Konsep Model, Paradigma, Teori dan Aspek Hukum”*, Surabaya: Vira Jaya Multi Press
- _____, 2009, *“Ekonomi Islam “Prespektif Teori Sistem dan Aspek Hukum”*, Surabaya: CV. Putra Media Nusantara
- Perkins, Dwight H, 1991, *“Economic System Reform in Developing Countries”* dalam Perkins dan Michael Roemer, *Reforming Economic System in Developing Countries*, Cambrdige, Nassachusetts, Harvard Institute for International Development
- Pratama, L. D., & Setyaningrum, W. (2018, September). Game-Based Learning: The effects on student cognitive and affective aspects. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1097, No. 1, p. 012123). IOP Publishing.
- Rahayu, Ani Sri, 2010, *“Pengantar Kebijakan Fiskal”*, Jakarta: Bumi Aksara
- Rosen, Sherwin, dan Bruce A. Weinberg, 1998, *“Incentives, Efficiency, and Government Provision of Public ServiceswurtMo/ Bank Conference Development Economics 1997”*, Washington DC, The World Bank
- Stiglitz, Josep E, 1986, *“Economics of the Public Sector”*, New York-London, WW Northon & Company

<https://gusvirosssafutrii.blogspot.com/2016/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-ar>. Diakses pada tanggal 28 November 2019

https://www.kompasiana.com/amp/ratudevi/peranan-pemerintah-dalam-perekonomian_550ea7e5a33311ae2dba81bb#aoh=15752100621329&_ct=1575210142777&csi=&referrer=https%3A%2f%2fwww.google.com&_tf=dari%20%251%24s. Diakses pada tanggal 01 desember 2019